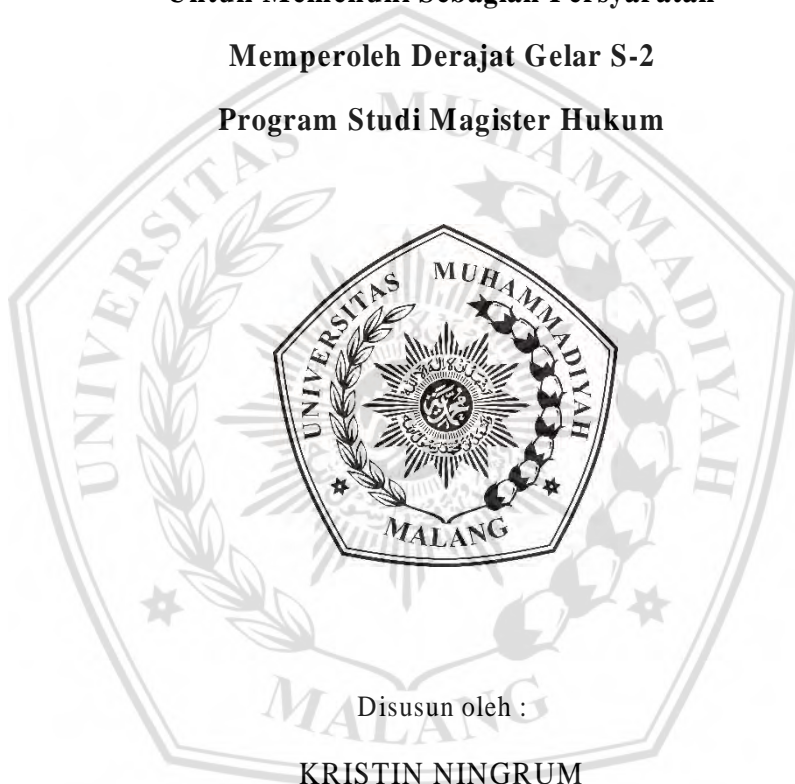


**RELEVANSI PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM (ABH) DENGAN PEMBINAAN ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH DPPPA
(Studi di DPPPA Kabupaten Jombang)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum**



Disusun oleh :

KRISTIN NINGRUM

NIM.201610380211006

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

November 2018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan TESIS dengan judul **“RELEVANSI PELAKSAAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DENGAN PEMBINAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH DPPPA (Studi di DPPPA Kabupaten Jombang)**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bpk Dr.Fauzan, Mpd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bpk Dr.Sidik Sunaryo selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bpk Dr.Tongat selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bpk Mokh.Najih, PhD selaku Ketua Program Magister Hukum UMM .
5. Bpk.Dr.Haris Tofly selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UMM.
6. Bpk.Dr.Surya Anoraga selaku Dosen Fakultas Hukum UMM.
7. Bapak – Ibu Dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Pegawai Administrasi Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.
10. Bapak Camat beserta seluruh staf Kecamatan Sumobito.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk Fakultas Hukum.

Wassalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Malang, 30 Oktober 2018

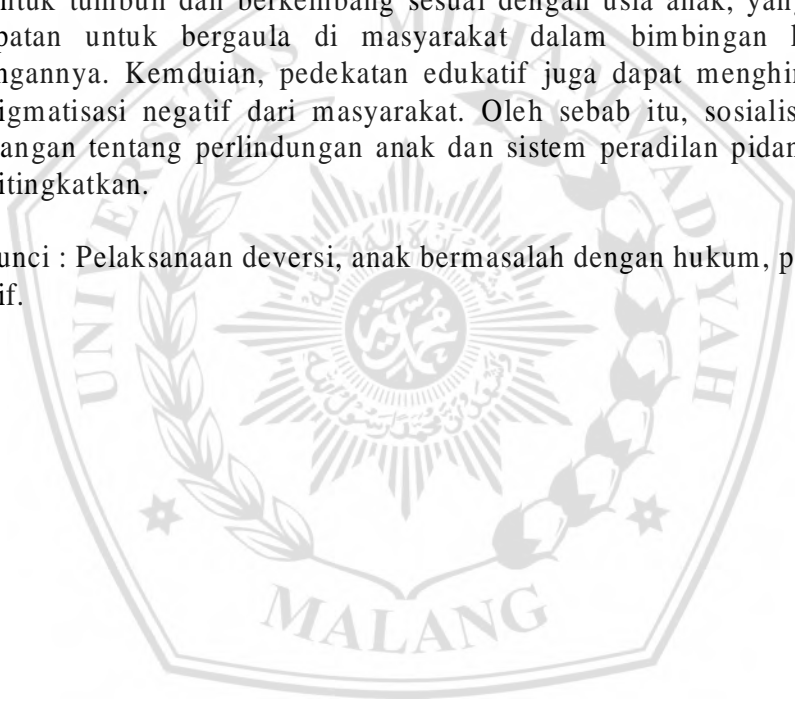
KRISTIN NINGRUM



ABSTRAK

Masalah pemidanaan atau penghukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan melakukan tindak pidana narkoba sangat penting, sebab dalam praktek banyak terjadi pelaksanaan pidana tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah residivis atau pengulangan tindak pidana narkoba pada anak. Pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana, harus mendapatkan perhatian khusus dengan pendekatan tertentu yang bermanfaat. Kajian ini bermaksud untuk menelaah efektifitas pemidanaan bagi anak dalam pendekatan edukatif dan dikaitkan dengan kebijakan pengaturannya. Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris dan normatif dengan bahan hukum skunder dan data primer, dengan analisis kualitatif. Dari kajian ini dapat dikemukakan bahwa pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dengan pendekatan edukatif mempunyai dampak yang positif bagi anak dan masyarakat. Hal ini dimungkinkan sebab pendekatan edukatif memberikan peluang kepada anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia anak, yang tetap diberi kesempatan untuk bergaul di masyarakat dalam bimbingan keluarga dan lingkungannya. Kemudian, pendekatan edukatif juga dapat menghindarkan anak dari stigmatisasi negatif dari masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi peraturan perundangan tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak harus terus ditingkatkan.

Kata kunci : Pelaksanaan deversi, anak bermasalah dengan hukum, pendekatan edukatif.



A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai negara besar, tentu juga memiliki masalah sumberdaya manusia yang besar pula. Dalam konteks kenakalan remaja, Indonesia memiliki jumlah kasus kenakalan remaja yang cukup tinggi dengan jumlah narapidana anak sebanyak 2.716 anak. Jawa Barat merupakan provinsi kedua tertinggi setelah Sumatera Utara yang memiliki jumlah anak pidana terbanyak di Indonesia dan Jawa Timur. Anak Pidana atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ditangani dalam sebuah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan selepas keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak¹.

Kembalinya seorang mantan narapidana anak ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau yang dapat disebut sebagai residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakberdayaan dalam diri seorang mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali dalam masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab di tengah pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya².

Kemudian menurut Kadela Saiter bahwa hal utama yang perlu diperhatikan dari keberadaan mantan narapidana adalah adanya pengawasan dari masyarakat dalam bentuk stabilitas dukungan dan pelayanan sosial yang khusus diberikan kepadanya dalam bentuk program ataupun aktivitas yang memungkinkan mantan narapidana tidak menjadi residivis. Hal ini selaras dengan fokus dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan dengan tujuan mempersiapkan anak didik lembaga pemasyarakatan agar diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat³.

¹ Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, "Residivis Anak sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Menghadapi Proses Integrasi kedalam Masyarakat' tersedia dalam https://www.researchgate.net/publication/325562484_RESIDIVIS_ANAK_SEBAGAI_AKIBAT_DARI_RENDAHNYA_KESIAPAN_ANAK_DIDIK_LEMBAGA_PEMASYARAKATAN_DALAM_MENGHADAPI_PROSES_INTEGRASI_KE_DALAM_MASYARAKAT/fulltext/5b162de10f7e9bda0ffe1942/325562484_RESIDIVIS_ANAK_SEBAGAI_AKIBAT_DARI_RENDAHNYA_KESIAPAN_ANAK_DIDIK_LEMBAGA_PEMASYARAKATAN_DALAM_MENGHADAPI_PROSES_INTEGRASI_KE_DALAM_MASYARAKAT.pdf?origin=publication_detail diakses [27 April 2018]

² Faisol Burlian, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hal 191.

³ Saiter, Kadela dalam sebuah penelitian yang berjudul *Prisoner Reentry: What Works, What Does Not, and What Is Promising* (2003), tth.

Perlindungan anak merupakan sebuah usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.⁴

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga permasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Perlindungan hak-hak bagi anak merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun pemerintah. Hal

⁴ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Medan, 2009. Hlm. XV

tersebut sesuai dengan bunyi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Kemudian juga dalam pasal 64 yang mengatur tentang beberapa pendekatan yang dapat dilakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, yang antara lain dengan pendekatan edukatif. Pendekatan ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembinaan dan pemulihan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Secara hukum sebenarnya mengenai anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan sudah mendapat perhatian dari Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut terdapat proses diversifikasi dan *restorative justice*. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* dapat dikembangkan di Indonesia. Konsep diversifikasi dapat dilakukan aparat penegak hukum dengan menjalankan hak dikresinya, sedangkan konsep *restorative justice* dapat dikembangkan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak pelaku tindak pidana. Proses diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Ada beberapa sebab anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

Residivis anak adalah mantan narapidana anak yang selepas keluar dari lembaga pemasyarakatan melakukan tindak kejahatan kembali serupa atau disebut sebagai penjahat kambuhan. Sebagai suatu contoh berdasarkan data primer yang

diperoleh dari Jurnal Harian Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung misalnya, diketahui bahwa 42,8% penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak per Bulan Maret 2015 pada salah satu kasus, yaitu kasus pencurian, adalah narapidana anak residivis⁵. Hal ini membuktikan bahwa kekhawatiran masyarakat akan penilaian atau stigmatisasi terhadap anak residivis adalah benar adanya. Berdasarkan kepada fenomena tersebut, maka pandangan atau penolakan yang berupa stigmatisasi dari masyarakat terhadap mantan narapidana anak masih berlaku. Ketidakberdayaan mantan narapidana anak untuk kembali ke lingkungan sosialnya sebagaimana ia diterima dahulu menjadi salah satu hal yang dapat menjadi stressor baginya untuk kemudian dilampiaskan kembali dalam bentuk perilaku menyimpang. Aksesibilitas yang minim terhadap pemenuhan hak sebagai seorang warga negara merupakan salah satu dampak dari ketidakberdayaan masyarakat dalam memberikan kepercayaan kembali kepada mantan narapidana anak untuk menjalankan perannya sebagai seorang remaja dan warga

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan pidana dalam pendekatan edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana dengan pendekatan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang

⁵ Lihat laporan Mariana, "Pola Pembinaan Narapidana Anak Narkoba di LP Anak Kelas III Bandung" Skripsi Fakultas Hukum Unisba Bandung, 2009, tidak dipublikasikan.

ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian⁶, penelitian ini mengambil tempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yang mempunyai peran untuk melaksanakan pembinaan edukatif bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana Narkoba.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam pembinaan anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Data Primer Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini pejabat yang membidangi masalah anak melakukan kenakalan, kejahatan atau anak yang bermasalah dengan hukum,
- b. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu, Peraturan Perundang-Undangan RI, yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Aturan teknis pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.

⁶ Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 72-79

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam kamuskamus hukum serta kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang yang digunakan, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum terutama yang berkaitan dengan dalam pembinaan dengan pendekatan edukatif terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, hambatan-hambatan yang dialami dan solusi-solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dengan cara :
 - 1) Studi Dokumen Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*", yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti⁷
 - 2) Wawancara Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis kaji⁸ , yaitu pejabat bidang pembinaan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, pada bagian perlindungan anak, Bapak Ainul Yaqin, dan Kapolsek Sumobito AKP. M. Agus, S.Sos. dan orangtua ABH.

4. Teknik Analisis Data

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hlm. 21

⁸ Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data primer analisis deskriptif, yaitu meneliti, menjelaskan dan menganalisis terhadap pelaksanaan pembinaan anak yang menyalahgunakan narkoba. Disamping itu penulis juga menggunakan teknik resume, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan penulis penggunaan dalam penulisan tinjauan pustaka. Dalam melakukan analisis selain dengan deskriptif, penulis juga menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul, kemudian disusun secara deskriptif dalam bentuk hasil analisis kajian ini.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Pendekatan Edukatif bagi anak (ABH) pelaku tindak pidana Narkoba

Di Kabupaten Jombang sejak tahun 2016 telah dibentuk DP3A yaitu suatu satuan dinas yang dibentuk untuk melaksanakan program pemerintah daerah mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun dasar hukumnya merujuk pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa DPPPA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. Pembinaan Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, dalam DPPPA terdapat bagian yang menangani sector Narkoba, sector Trafiking, peningkatan kualiatas pembinaan anak dan sector penanganan korban kekerasan terhadap anak. Dari kondisi ini, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan anak, dapat dimaknai sebagai meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat yang sedang menghadapi kendala atau maslah dimasyarakat. Oleh sebab itu sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial, perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasional terhadap ketidak pahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan perannya di masyarakat.

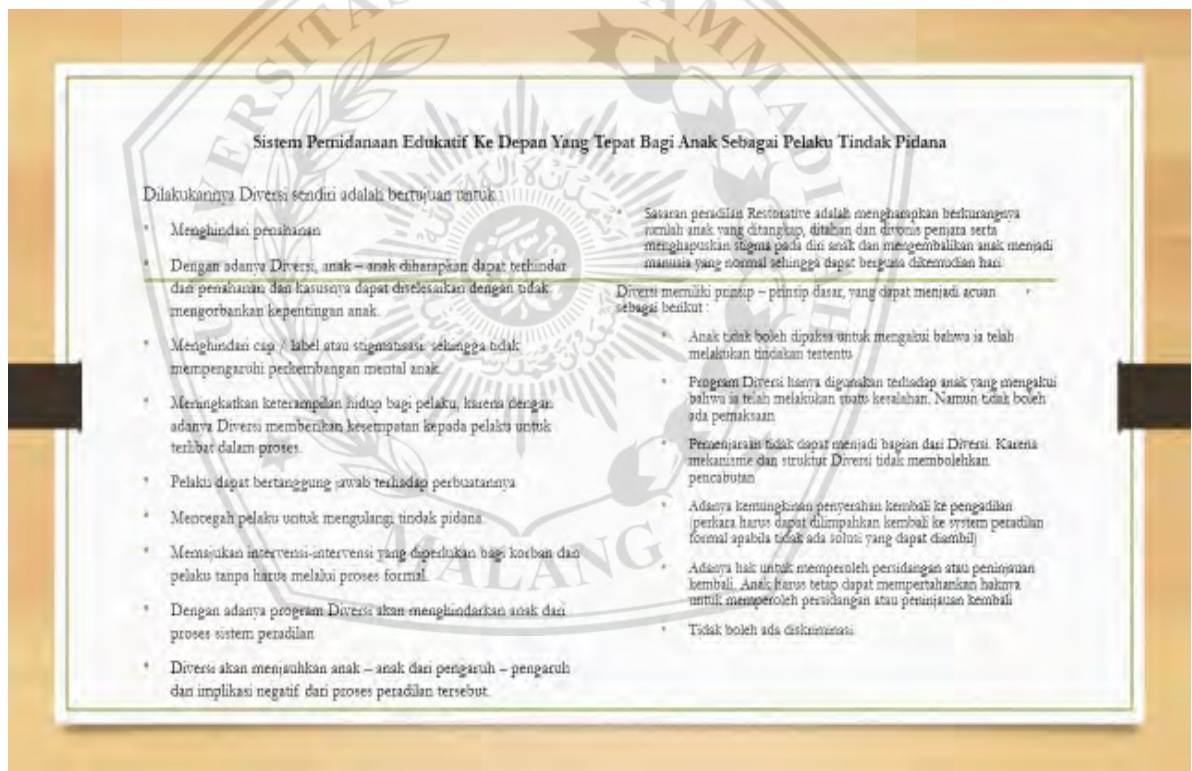
Penanggulang masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap anak-anaknya, orang tua wali dari anak yang menjadi pencandu narkotika berkewajiban melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapat pengobatan dan perawatan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 55

Undang-Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian orangtua dapat terlibat dalam proses pembinaan anak tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu salah satunya memberikan upaya diversi. Salah satu upaya diskresi yaitu diversi. Diversi merupakan kebijakan formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Beberapa uraian pendekatan diversi, tersebut dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1. Tentang Pola Diversi bagi ABH



Sumber : berbagai bahan diolah 2018.

Diversi terhadap anak penyalahgunaan narkotika harus dapat dilaksanakan dengan baik. Diversi tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Proses Diversi merupakan proses

yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban, dan atau orang/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja social professional berdasarkan pendekatan keadilan *Restorative justice* dalam Pasal 8 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan perwujudan Pasal 64 Undang-Undang No.23 Tahun 2003 yaitu menjelaskan tentang perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak-anak merupakan korban yang dimanfaatkan oleh orang dewasa (bandar dan pengedar) narkoba untuk melancarkan peredaran narkoba. Sudah selayaknya anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba diberikan perlindungan. Penjara bukanlah tempat terbaik bagi anak, karena dengan pemenjaraan terhadap anak dapat memberikan dampak buruk kepada perilaku dan mental anak. Pembinaan yang diterapkan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa yang juga tersangkut dengan masalah narkoba, jika dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa maka akan berdampak negatif terhadap anak-anak. Maka ketentuan diversifikasi dalam undang-undang yang ada semestinya dapat dilaksanakan dengan maksimal⁹.

Selain itu upaya melakukan perlindungan hukum dengan memberikan diversi, terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba atau yang menjadi korban dengan cara tidak memenjarakan anak melainkan dengan memberikan perawatan di panti rehabilitasi, dengan pendekatan edukatif dan melibatkan orangtuanya sehingga dapat disembuhkan dari ketergantungan terhadap narkoba.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, konsep mengenai diversi terhadap anak pengguna penyalahgunaan narkoba belum sepenuhnya dipahami oleh petugas, konsep tersebut sudah mulai direalisasikan di wilayah Kabupaten Jombang tetapi belum maksimal. Pelaksanaan diversi terhadap anak penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu upaya non penal untuk

⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Mufida Hartanti, kabid Pembinaan Anak Bernasalah dengan Hukum , LPPA Kab. Jombang, 27 Maret 2018

penanggulangan kejahatan di bidang narkoba, karena pemenjaraan dianggap kurang efektif terutama bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Jombang, adalah dalam kasus Hamdan (nama samara) remaja 15 tahun yang sudah ditetapkan (LP/1895/IV/2016/LPG/ Dit Res Narkoba) oleh kepolisian Resort Jombang sebagai pemakai Narkoba jenis “shabu”. Hamdan merupakan salah satu anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan perlindungan hukum yaitu proses diversi dan *restorative justice* dengan pendekatan edukatif yaitu dibina dengan memasukkan anak ke dalam pondok pesantren dengan melibatkan orangtuanya¹⁰. Dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik, anak tersebut akhirnya dapat dilepaskan dari masalah narkoba dan anak tersebut telah berhasil sekolah dengan baik.

Selain konsep pendekatan edukatif yang dilakukan dengan “diversi” juga dapat dilakukan dengan pendekatan konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah) dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan tindakan atau hukuman yang tepat terhadap pelaku.

Konsep diversi dan *restorative justice* adalah dua konsep yang masih baru untuk para penegak hukum di wilayah Kabupaten Jombang, akan tetapi di wilayahkerja LPPA Jombang kedua konsep tersebut telah digunakan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) guna bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 6 Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu pengaturan lainnya juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu ;

a. Pasal 128 yang menyatakan bahwa:

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ainul Yakini Kabid Perlindungan Anak DPPPA Kab. Jombang, 27 Maret 2017.

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000,00.
 - (2) Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- b. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika
- (1) Bahwa orang tua wali dari pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tujuan dari konsep diversi yaitu : (a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan; (c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, (d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, (e) Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Kemudian berdasarkan Pasal 64 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur perlindungan terhadap anak yaitu: Pertama, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana khusus. Keempat, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Keenam, perlindungan dari pemberitaan identitas dan media massa dan untuk menghindari labelisasi. Maka Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perlindungan anak dan Perempuan Kab. Jombang. Peneliti mendapatkan informasi tentang Jumlah Pelaku

Tindak Pidana Narkotika dibawah umur dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, yang disajikan dalam bentuk Tabel dan Grafik sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di bawah Umur, dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. Di Kab. Jombang

No	Tahun	Jumlah Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan anak dibawah umur	Usia	Vonis Hakim		
				Penjara	Rehab	Diversi
1	2014	35 (orang)	15-17	79 %	21 %	-
2	2015	25 (orang)	13-17	65 %	35 %	(17)
3	2016	38 (orang)	10-18	62 %	18 %	20% (20)
4	2017	40 (orang)	12-17	35%	40 %	25% (25)

Sumber data: Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan Polres 2014-2017

Dari table 1 diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir di Kab. Jombang terdapat data bahwa anak-anak yang bermasalah dengan hukum masih banyak yang dikenakan hukum penjara oleh vonis hakim, dibanding dengan jalur deversi atau pembinaan bagi anak dan deversi baru dilakukan tahun 2016. Hal ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diwilayah Kab. Jombang belum sesuai dengan Pasal 64 dan juga Pasal 66 Undang-Undang UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu yang menjelaskan tentang perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Termasuk ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai konsep deversi. Berdasarkan vonis Hakim yang terdapat di tabel tidak semua anak di bawah umur diberikan perlindungan secara khusus, masih ada beberapa anak yang mendapatkan hukuman penjara, dengan memberikan hukuman penjara terhadap

anak yang berhadapan dengan hukum akan membuat jiwa dan mental si anak terganggu.

Adapun beberapa bentuk pelaksanaan pembinaan ABH dengan pendekatan edukatif antara lain dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum, maka oleh Kepala Desa, berkoordinasi Satpol-PP Kec, DPPPA dan Kepolisian Sektor. Kemudian selanjutnya dilakukan mediasi untuk menuju deversi, apabila deversi disepakati, maka anak dikembalikan kepada orangtuanya untuk mendapatkan proses pendidikan mental, dan moral agar menjadi lebih baik. Sedangkan apabila deversi tidak disepakati, maka anak ABH akan diproses hukum sebagaimana diatur dalam sistem peradilan anak.
2. Kemudian beberapa upaya sebagai tindakan preventif (pencegahan) dilakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi serta pengawasan, maka pihak DPPPA bersama Kecamatan dilakukan ditingkat Kecamatan (Aparat Desa, Aparat Kecamatan), Sosialisasi juga dilakukan pada guru-guru sekolah, mulai SD sampai SMU, terutama para kepala sekolah dan guru pembina siswa.
3. Dari informasi yang penulis dapatkan menunjukkan bagi bagi anak (ABH) yang tertangkap penyalagunaan narkoba baik oleh aparat desa maupun pihak kepolisian, maka anak tersebut dibawa ke kantor kepolisian setempat untuk diproses dan dimediasi, kemudian dilakukan deversi, untuk dilaksanakan pemidanaan dengan pendekatan edukatif.

2. Faktor pendukung efektifitas pelaksanaan pidana dengan pendekatan edukatif bagi Anak yang Bermasalah dengan Hukum.

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi

negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Adapun factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum dengan pendekatan edukatif dalam pelaksanaannya oleh DPPA Kab. Jombang antara lain :

a. Faktor yang mendukung ;

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum, khususnya penyalahgunaan narkoba, mendapat perhatian pemerintah daerah dengan dibentuknya satuan Dinas Pelindungan Anak dan perempuan;
- (2) Terdapat anggaran daerah yang khusus dialokasikan dalam membantu program tersebut;
- (3) Dukungan dari masyarakat dan tokoh masyarakat dengan menyediakan tempat pelaksanaan pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum, khususnya penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan edukatif.

- (4) Peranan orang tua dari anak-anak yang bermasalah dengan hukum tersebut¹¹.

b. Faktor yang menghambat;

Adapun factor-faktor yang menghambat antara lain, adalah

- (1) Aparat penegak hukum masih kurang memahami dengan adanya konsep diversi dan restorative justice selain itu dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sehingga tidak jarang terjadi diskriminasi terhadap anak didalam menjalankan proses hukum.
- (2) Bahwa terdapat hambatan koordinatif antara aparat penegak hukum kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat yang masih terdapat perbedaan pandangan mengenai pendekatan rehabilitasi dan edukatif bagi anak yang bermasalah dengan hukum khususnya dalam penyalahgunaan narkoba.
- (3) Keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses pembinaan masih sangat kurang sebab tidak termasuk dalam tupoksinya;
- (4) Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki oleh LPPA kab. Jombang sehingga belum bias menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Jombang.
- (5) Masih terbatasnya sumberdaya yang memahami konsep hukum perlindungan anak yang berbasis pada pendekatan edukatif dalam menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum.
- (6) Faktor kebudayaan dalam hal ini masih kuatnya stigma masyarakat terhadap anak sebagai korban dalam penyalahgunaan narkoba. Korban sudah dianggap atau di “cap” buruk oleh masyarakat, bahwa anak tersebut tidak baik, bahkan sebagian masyarakat yang masih menganggap anak yang terlibat kasus narkoba, adalah anak yang tidak baik dan tidak bias disembuhkan.

¹¹ Hasil wawancara dengan AKP. M Agus S.Sos, Kapolsek Sumobito, 25 April 2018 dan narasumber lainnya diolah.

Dari factor penghambat dan pendukung tersebut, menunjukkan bahwa pola pembinaan dengan pendekatan edukatif, deversi bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum, khususnya penyalahgunaan narkoba, masih perlu dukungan yang luas dan terus menerus dari pemerintah, pemerhati dan masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan di waktu-waktu mendatang.

c. Kelebihan dan kekurangan sistem pembinaan dengan pendekatan edukatif¹²;

Apabila di lihat dalam pelaksanaan pembinaan ABH dengan pendekatan edukatif, yang dilakukan di DPPPA kab. Jombang, maka ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada program tersebut, yaitu :

1. Beberapa Kelebihan
 - a. Perilaku anak (ABH) dan orang tua dapat saling berubah, sebab terjadi interaksi untuk instruksi memperbaiki diri;
 - b. Dengan deversi anak mendapatkan perhatian khusus, bahkan bisa 24 jam;
 - c. Masa depan anak lebih terjamin,
 - d. Kehidupan anak terlindungi.
 - e. Pembinaan dan pembimbingan anak.
 - f. Penghargaan terhadap pendapat dan pikiran anak lebih dihargai.
2. Kekurangan sistem pembinaan edukatif ABH
 - a. Masyarakat merasa ragu, tidak pasti dengan pola pendekatan ini, karena seolah terdapat ketidakadilan.
 - b. Anak-anak yang menjadi ABH terdapat potensi mengulang lagi kejahatannya, sebab tidak diberi hukuman yang menjerakan.

¹² Hasil wawancara dengan narasumber/responden diolah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Bahwa dalam pelaksanaan pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum, khususnya terhadap penyalahgunaan narkoba di Kab. Jombang telah ada bentuk komitmen yang serius dari pemerintah, yaitu dengan dibentuknya SKPD yang bertanggungjawab dalam bidang tersebut, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menangani masalah tersebut.
- b. Pelaksanaan pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum khususnya dalam penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dengan pendekatan edukatif sudah dapat berjalan dengan efektif meskipun masih belum berjalan secara maksimal.
- c. Pembinaan dengan pendekatan edukatif telah melibatkan berbagai komponen SKPD termasuk Dinas Sosial, kepolisian dan lembaga Advokasi Anak Jombang, hal ini menunjukkan bahwa masalah ABH mendapatkan perhatian dari berbagai komponen masyarakat, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang.
- d. Adapun factor-faktor yang menghambat dan mendukung terhadap pelaksanaan pembinaan anak dengan pendekatan edukatif antara lain; factor pendukung adalah peranan pemerintah daerah melalui dibentuknya SKPD DPPPA, dan dukungan Kepolisian, kemudian dukungan masyarakat dan orangtua anak yang bermasalah dengan hukum. Sedangkan factor penghambat nya adalah factor koordinasi antara instansi dinas terkait, factor jumlah SDM yang terbatas, factor pemahaman yang belum komprehensif dan factor budaya masyarakat.

2. Saran

- a. Untuk meningkatkan pendekatan pembinaan secara edukatif menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu dilakukan upaya sosialisasi dan penyuluhan yang lebih ditingkatkan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, baik oleh Dinas

PPPA maupun dinas terkait, termasuk kerjasama dengan komponen masyarakat.

- b. Melihat hambatan- hambatan dalam rangka implementasi ide diversifikasi dalam system peradilan pidana anak, maka perlu dilakukan segera pembaruan system peradilan pidana materiel anak, system hukum formal anak, dan system pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Selain itu penegak hukum harus diberikan pelatihan tentang diversifikasi agar dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak nakal dapat dilakukan dengan tepat.
- c. Hidup sehat tanpa narkoba dengan cara menyadari ancaman bahaya narkoba dan cara lain untuk menghadapi situasi agar tidak masuk ke dalam lingkaran setan narkoba, dengan langkah mengajar anak untuk melindungi dirinya sendiri ; mengajarkan anak untuk mengekspresikan kreatifitasnya; mengajarkan kepada anak tentang obat-obatan terlarang dan efeknya.
- d. Mulailah dengan hubungan / komunikasi orangtua-anak yang baik dengan cara : waspada terhadap tanda-tanda penggunaan obat-obatan terlarang ; jangan mencontohkan menggunakan obat terlarang; bantu anak untuk menghindar dari Bandar narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak – Anak / Remaja*. Armico. (Bandung,1983)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007
- Barda Nawawi, Arif. *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Eesco.Bandung,2001.
- Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2009)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Dirdjosisworo, Soejono. *Penanggulangan Kejahatan*.Bandung, 1983.
Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung.. Bandar Lampung. Unila Press, 2010.
- Faisol Burlian, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (apaengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT Refika Aditama, Medan. 2009.
- Mariana Sanusi, “Pola Pembinaan Narapidana Anak Narkoba di LP Anak Kelas III Bandung” Skripsi Fakultas Hukum Unisba Bandung, 2009, tidak dipublikasikan.
- Muhammad, Abdulkadir.*Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.
- Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta:Bina Aksar, 1984.
- Poernomo, Bambang.*Asas – Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1981.
- Saraswati, Rika.2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Sangarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3S, 1989.

Saiter, Kadela dalam sebuah penelitian yang berjudul Prisoner Reentry: What Works, What Does Not, and What Is Promising (2003)

Soekanto, Soerjono. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.1983.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 1986.

Sujono,AR dan Dabel Bony. *Komentar dan pembahasan undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba*. Jakarta Timur. 2011.

Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2013.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Internet :

Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, “Residivis Anak sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Menghadapi Proses Integrasi kedalam Masyarakat’ tersedia dalam https://www.researchgate.net/publication/325562484_RESIDIVIS_ANAK_SEBAGAI_AKIBAT_DARI_RENDAHNYA_KESIAPAN_ANAK_DIDIK_LEMBAGA_PEMASYARAKATAN_DALAM_MENGHADAPI_PROSES_INTEGRASI_KE_DALAM_MASYARAKAT/fulltext/5b162de10f7e9bda0ffe1942/325562484_RESIDIVIS_ANAK_SEBAGAI_AKIBAT_DARI_RENDAHNYA_KESIAPAN_ANAK_DIDIK_LEMBAGA_PEMASYARAKATAN_DALAM_MENGHADAPI_PROSES_INTEGRASI_KE_DALAM_MASYARAKAT.pdf?origin=publication_detail

diakses [27 April 2018]

Hasil Wawancara dengan ibu Mufida Hartanti, kabid Pembinaan Anak Bernasalah dengan Hukum , LPPA Kab. Jombang, 27 Maret 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Mufida Hartanti Kabid Pembinaan Anak LPPA Kab. Jombang, 27 Maret 2017.

DAFTAR ISI

COVER.....	I
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	II
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	III
SURAT PERNYATAAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
ABSTRAK.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. PERMASALAHAN.....	5
C. METODOLOGI PENELITIAN.....	5
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	8
E. KESIMPULAN DAN SARAN.....	18
F. DAFTAR PUSTAKA.....	21

